

## Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

\* **Rendy Ananta Nadapdap<sup>1</sup>, Sylvina Rusadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [rendyanantanadapdap@student.uir.ac.id](mailto:rendyanantanadapdap@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban parkir liar di Kecamatan Marpoyan Damai. Evaluasi dilakukan melalui lima indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan belum optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan, kurangnya tenaga petugas di lapangan, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan publik dilaksanakan serta kontribusi terhadap pengembangan sistem perparkiran yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kinerja, Parkir Liar, Dinas Perhubungan, Pekanbaru

### Abstract

*This study aims to evaluate the performance of the Department of Transportation in addressing illegal parking in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. The evaluation is based on five indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. A qualitative descriptive method was applied, using observation, interviews, and documentation. The results showed that the performance of the Department of Transportation was not optimal, due to weak supervision, lack of field officers, and low public compliance. This study provides insight into the implementation of public policy and contributes to the development of better parking management systems.*

**Keywords :** Performance Evaluation, Illegal Parking, Transportation Department, Pekanbaru

## PENDAHULUAN

Fenomena parkir liar menjadi salah satu permasalahan serius di Kota Pekanbaru, terutama di Kecamatan Marpoyan Damai. Kepadatan arus kendaraan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan perpustakaan yang baik menyebabkan munculnya praktik parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta estetika kota. Parkir liar kerap ditemukan di bahu jalan, trotoar, hingga jalur hijau, sehingga mengakibatkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Sebagai respons terhadap persoalan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan beberapa regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Tepi Jalan Umum. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan parkir ini dipercayakan kepada pihak ketiga, yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri, yang bertanggung jawab atas pelayanan parkir, pelatihan juru parkir, dan pemungutan retribusi. Namun dalam praktiknya, banyak juru parkir yang tidak mengenakan atribut resmi dan tidak memberikan karcis parkir, yang menandakan lemahnya pengawasan di lapangan.

Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan proses untuk menentukan sejauh mana suatu program, kebijakan, atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn menjelaskan bahwa terdapat lima indikator evaluasi kebijakan publik yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan (equity), dan responsivitas.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 melalui kelima indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn, dengan studi kasus di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai salah satu kawasan strategis yang padat aktivitas masyarakat.

Parkir liar merupakan kegiatan memarkir kendaraan di tempat yang tidak ditunjuk sebagai tempat parkir resmi, seperti di trotoar, pinggir jalan dan area terlarang lainnya, tanpa mendapatkan izin dari petugas. Kegiatan ini sering mengganggu lalu lintas, mengganggu pengaturan lalu lintas, dan mengganggu fungsi ruang publik.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola perpustakaan di tepi jalan umum. PT. Yabisa Sukses Mandiri adalah pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan tentang layanan parkir dan penyediaan fasilitas parkir.

Evaluasi dalam konteks kebijakan publik adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan atau kegunaan suatu kebijakan berdasarkan kriteria tertentu. William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi mencakup lima indikator utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 melalui lima indikator tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan dan hambatan yang terjadi di lapangan.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan

fokus penelitian. Informan terdiri dari Kepala UPT Perpustakaan, dua orang juru parkir yang beroperasi di wilayah Marpoyan Damai, dan dua warga masyarakat yang merasakan dampak langsung dari keberadaan parkir liar di lingkungannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

William N. Dunn (2003:429-437) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan lima indikator utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan (equity), dan responsivitas. Indikator-indikator ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban parkir liar akan dianalisis berdasarkan kelima indikator ini.

### A. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada seberapa efektif suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan atau targetnya. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, semakin efektif kebijakan.

Ini mencakup evaluasi hasil yang diharapkan, seperti penurunan jumlah parkir liar, peningkatan kepatuhan juru parkir, dan peningkatan ketertiban lalu lintas. Penertiban dianggap berhasil ketika mereka benar-benar menangani masalah parkir liar. Adapun sub indikatornya yaitu:

#### 1. Hasil yang ingin dicapai.

Salah satu tujuan dari upaya penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, terutama di Kecamatan Marpoyan Damai, adalah untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dengan mengurangi jumlah parkir liar di tempat-tempat yang rentan terhadap pelanggaran.

Berdasarkan observasi yang terjadi di lapangan memperlihatkan pernyataan “kinerja Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir Liar sudah bagus” akurat, ditandai dengan adanya patroli penertiban yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan yang membuktikan keseriusan mereka dalam melakukan penertiban juru parkir maupun kendaraan yang parkir sembarangan serta kelengkapan atribut juru parkir yang sudah hampir merata meskipun masih terdapat keluhan terkait masih adanya oknum juru parkir dan kendaraan yang parkir sembarangan di tepi jalan Arifin Ahmad.

### B. Efisiensi

Efisiensi yaitu keterkaitan antara usaha dan efektivitas, yang terakhir umumnya dapat mengukur dengan ongkos moneter. Adapun sub indikatornya yaitu:

#### 1. Biaya

Untuk mengetahui seberapa efektif Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menangani parkir liar, faktor biaya harus menjadi perhatian utama. Pengadaan atribut petugas, operasional kendaraan patroli, penggunaan bahan bakar, dan kompensasi atau insentif bagi petugas yang bekerja di lapangan adalah semua contoh biaya yang terkait dengan pelaksanaan penertiban.

Adapun hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kekurangan dana telah memengaruhi lancarnya program penertiban parkir liar di Kecamatan Marpoyan Damai. Kegiatan teknis yang berkaitan dengan penertiban tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena anggaran tidak memadai untuk melaksanakan program secara rutin dan menyeluruh di semua titik rawan parkir liar.

## 2. Tenaga

Dalam hal efisiensi kinerja organisasi, merujuk pada jumlah, kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Efisiensi tenaga dapat dinilai dari bagaimana instansi memaksimalkan peran petugas yang ada untuk mencapai tujuan tanpa terjadi pemborosan atau ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah personel yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga yang tersedia masih belum memadai untuk menangani masalah parkir liar di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Dengan jumlah personel sebanyak 40 yang harus tersebar di seluruh kota, personel tidak dapat didistribusikan secara merata ke setiap lokasi di mana terjadi pelanggaran.

Peneliti menemukan bahwa hanya 1 regu dengan 3 petugas patroli di lokasi strategis seperti Jalan Arifin Ahmad. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan banyaknya lalu lintas dan parkir di area tersebut.

Selain itu, minimnya jumlah staf menyebabkan penertiban rutin di seluruh lokasi tidak dapat dilakukan, sehingga beberapa area menjadi luput dari pengawasan dan rentan kembali dijadikan tempat parkir liar. Oleh karena itu, karena jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja di lapangan, efisiensi kerja petugas masih rendah.

## C. Kecukupan

Menurut William Dunn (2003:430), kecukupan dikaitkan dengan tingkat efektivitas dalam memenuhi nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang memungkinkan masalah muncul. Adapun sub indikatornya yaitu:

### 1. Kecukupan Tindakan

Kecukupan tindakan merupakan tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk penertiban parkir liar di Kecamatan Marpoyan Damai untuk menjawab pertanyaan yang muncul di lapangan dievaluasi dalam penelitian ini.

Peneliti di lapangan menemukan bahwa setelah beberapa hari penertiban, beberapa juru parkir liar kembali beroperasi di lokasi yang sama. Tidak ada tindakan tambahan yang dilakukan untuk meningkatkan upaya penertiban kehilangan taringnya, seperti pencatatan pelanggaran, penyitaan atribut, atau pemanggilan secara formal.

Dalam wawancara dengan salah satu juru parkir, peneliti menemukan bahwa yang bersangkutan mengenakan atribut seperti rompi dan pluit, namun tidak membawa karcis resmi serta beroperasi di area tanpa rambu parkir. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat juru parkir dengan status yang tidak jelas di satu sisi tampil seperti resmi, namun tidak memenuhi syarat administrasi dan aturan lokasi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pendataan dari pihak Dinas Perhubungan, serta membuka peluang bagi oknum untuk melakukan pungutan liar secara terselubung.

## D. Perataan

Dalam evaluasi kinerja, mengacu pada seberapa baik penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan secara merata di seluruh titik rawan pelanggaran, tanpa memihak lokasi atau hanya menangani area tertentu. Untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapat perlakuan yang sama dan agar pelayanan publik dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, prinsip perataan sangat penting.

### 1. Sebaran Titik Penertiban

Sebaran titik penertiban adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyebarkan lokasi penertiban secara merata di area yang terdampak parkir liar. Dalam situasi ini, penertiban seharusnya mencakup bukan hanya jalan utama atau pusat keramaian, tetapi juga kawasan pemukiman, jalan lingkungan, dan lokasi yang sering luput dari perhatian.

Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti mempertimbangkan perspektif yang berbeda dari masyarakat dan juru parkir yang bekerja di lapangan, jelas bahwa penertiban parkir liar belum diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk memastikan bahwa upaya penertiban diberikan kepada setiap wilayah secara proporsional, masih adanya area yang tidak terawasi menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan. Ini adalah bukti penting untuk menilai tingkat pemerataan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### E. Responsivitas

Responsivitas dalam evaluasi mengacu pada seberapa baik suatu organisasi atau lembaga mampu memahami dan menangani kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari program atau kebijakan.

#### 1. Kecepatan Tindak Lanjut Aduan

Salah satu cara untuk menilai responsivitas suatu organisasi publik adalah dengan melihat seberapa cepat responsnya terhadap laporan masyarakat. Dalam kasus penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kecepatan ini menunjukkan sejauh mana organisasi mampu menanggapi laporan masyarakat secara cepat dan berkelanjutan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan Dinas Perhubungan berusaha untuk lebih responsif terhadap laporan yang masuk, setidaknya melalui kanal terbuka seperti media sosial atau melalui laporan langsung kepada petugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun responsivitas belum merata sepenuhnya, ada tanda-tanda bahwa kinerja dan komitmen terhadap penanganan aduan telah meningkat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecepatan aduan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saat ini menunjukkan variasi. Terlepas dari kekurangan yang masih ada, upaya untuk memperbaikinya sudah mulai terlihat. Agar respons dapat diberikan secara cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan, sistem pelaporan berbasis masyarakat harus diperkuat dan petugas juga harus diperkuat.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, maka dapat disimpulkan;

*Pertama*, penertiban yang dilakukan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi efektivitas (hasil belum maksimal dalam mengurangi parkir liar), efisiensi (terbatasnya tenaga dan anggaran), maupun kecukupan (tindakan yang diambil belum cukup memberi efek jera). Di sisi lain, responsivitas terhadap aduan masyarakat masih bersifat reaktif dan belum konsisten, serta ketepatan sasaran masih kurang karena penertiban lebih difokuskan pada jalan besar dan belum menjangkau wilayah lain secara merata.

Kedua, adanya faktor penghambat yang menyebabkan belum optimalnya kinerja Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar di Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Adapun faktornya yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan luas area kerja dan titik parkir liar yang harus diawasi.
2. Terbatasnya Anggaran, keterbatasan ini mempengaruhi ketersediaan sarana seperti kendaraan operasional dan perlengkapan penertiban di lapangan, serta frekuensi patroli.
3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, karena kurangnya kesadaran terhadap aturan dan kurangnya rasa takut terhadap sanksi, masyarakat pengguna kendaraan seringkali masih parkir sembarangan. Selain itu, banyak warga yang menjadi juru parkir liar meskipun telah diberi teguran.
4. Ketidaktegasan Tindakan Penertiban, berdasarkan pernyataan informan, banyak juru parkir yang melanggar aturan hanya diberi teguran lisan tetapi tidak pernah ditindak. Karena tidak ada konsekuensi bagi mereka yang melanggar, pelanggaran terus berulang.
5. Distribusi Penertiban yang Belum Merata, di Kecamatan Marpoyan Damai masih ada beberapa area yang tidak diawasi, terutama di permukiman atau jalan kecil. Dengan penekanan lebih besar pada jalan-jalan besar, lebih banyak ruang parkir liar muncul di daerah lain yang tidak diawasi oleh Dinas Perhubungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jannah, G. R., Fitri, I. K., Hudila, H., & Putri, A. M. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Memberantas Juru Parkir Liar Di Area Spbu Kota Pekanbaru. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA MERDEKA EMBA*, 3(2), 21-32.
- M. Aidil Abrori, Marwan Lubis, and Gunawan Tarigan. 2024. "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Pada Pusat Perbelanjaan Yang Ada Di Kecamatan Medan Denai." *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil* 2(2):73–81. doi:10.61132/konstruksi.v2i2.228.
- Mais, Ririn, Daud Liando, and Fanley Pangemanan. 2019. "Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward Dan Punishment Aparatur Sipil Negara Di Kota Bitung." *Jurnal Eksekutif* 3(3).
- William, N. D. (2003). *Pengantar analisis kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.